

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BPNT MELALUI E-WARONG VERSUS PT POS INDONESIA DI KOTA PADANG

Robi Eka Putra*, Roni Ekha Putera, Desna Aromatic

Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Andalas

Abstract

The purpose of this study is to see the implementation of BPNT distribution through e-warong and PT Pos Indonesia, as a form of implementation of public policies in Indonesia. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. Sources of research data obtained through interview and case studies to see the implementation of BPNT distribution especially in Padang City. The results showed that the distribution of BPNT in e-Warong is a form of strengthening the community's economy, both for beneficiaries, e-Warong, and for the community around e-Warong as providers or producers of food needs. Meanwhile, PT Pos Indonesia can provide fast and more targeted services to recipients of BPNT assistance in the form of cash assistance. So it can be concluded that the distribution of BPNT in these two providers has its own advantages and disadvantages, so it needs to be taken into consideration by the government in improving further distribution of BPNT in Indonesia such as making a schedule for distributing BPNT based on harvest periods in general in Indonesia.

Keywords: *Implementation, Poverty, BPNT, e-Warong, Pos Indonesia*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi penyaluran BPNT melalui e-warong dan PT Pos Indonesia, sebagai bentuk implementasi kebijakan publik yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi kasus untuk mendeskripsikan implementasi penyaluran BPNT khususnya di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BPNT di e-Warong merupakan bentuk penguatan ekonomi masyarakat baik untuk penerima bantuan, e-Warong, maupun kepada masyarakat sekitar e-Warong sebagai penyedia atau produsen kebutuhan pangan. Sedangkan di PT Pos Indonesia dapat menyediakan pelayanan yang cepat dan lebih tepat sasaran kepada penerima bantuan BPNT dalam bentuk bantuan secara tunai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran BPNT di kedua provider ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga perlu dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam penyempurnaan penyaluran BPNT selanjutnya di Indonesia seperti pembuatan jadwal penyaluran BPNT berdasarkan periode panen pada umumnya di Indonesia.

Article history:

Submission July 1 2022

Revision November 9 2022

Accepted November 14 2022

Published December 26 2022

Corresponding author

*Email: robiekaputradarnius@gmail.com

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, BPNT, e-Warong, Pos Indonesia

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan realita sosial yang sudah menjadi masalah dan perhatian di seluruh dunia. Permasalahan kemiskinan selalu menghantui setiap negara, meskipun dampak yang dihasilkan oleh kemiskinan berbeda-beda. Permasalahan kemiskinan didasari dengan situasi umum yang ada di negara-negara tersebut, seperti masalah pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan kesejahteraan, dan rendahnya tingkat pendapatan. Lebih lanjut, disebutkan bahwa masalah kemiskinan yang ada di negara-negara Dunia Ketiga seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin telah menjadi semakin kompleks sehingga menuntut pemecahan yang komprehensif (Djaenal et al., 2021; Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin, 2021; Setyawan, 2001).

Kemiskinan umumnya diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan dalam berusaha, serta kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara baik, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan; sehingga pada ujungnya berdampak pada aspek sosial dan moral (Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin, 2021; Selviana, 2016). Terdapat beberapa faktor penyebab terjadi kemiskinan di negara-negara berkembang, salah satunya adalah faktor ketidakberuntungan, yang menurut Chambers (Soetrino, 1997) menjadi bagian dari pendekatan *integrated poverty* atau kemiskinan terpadu. Terdapat lima ketidakberuntungan yang melingkupi orang atau keluarga miskin, yaitu kemiskinan (*poverty*), fisik yang lemah (*physical weakness*), kerentanan (*vulnerability*), keterisolasian (*isolation*), dan ketidakberdayaan (*powerlessness*).

Permasalahan kemiskinan juga menjadi masalah besar bagi Indonesia. Berdasarkan data BPS (2021), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 adalah sebesar 26,50 juta orang, menurun sebesar 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) untuk mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk menangani permasalahan kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) merupakan salah satu jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang saat ini bersandar pada regulasi terbaru berupa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. BNPT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran

rumah tangga miskin dalam mengakses sebagian kebutuhan pangannya (Hermawan et al., 2021). Rumah tangga miskin memiliki risiko lebih besar untuk sulit atau bahkan tidak mendapatkan akses pangan akibat adanya keterbatasan pendapatan dan faktor-faktor lain dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin (Hjelm et al., 2016; Sakyi, 2012). Oleh sebab itu, BPNT hadir untuk menanggulangi hal tersebut, sebagai wujud dari implementasi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.

Program BNPT mulai direalisasikan pada tahun 2017 secara bertahap sebagai transformasi dari Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) yang dinilai perlu untuk disempurnakan. Perubahan yang terjadi tidak hanya dari pola subsidi pangan (beras) menjadi pola bantuan sosial pangan, akan tetapi juga pola penyalurannya yang menjadi cashless yang bertujuan untuk mendorong perilaku produktif penerima bantuan sekaligus peningkatan transparansi dan akuntabilitas bantuan. BPNT berbentuk hybrid antara voucher yang dicairkan secara cash transfer dengan in kind transfer. Hal ini berarti bahwa masyarakat miskin yang dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan secara non tunai (cashless) melalui kartu elektronik yang menggunakan sistem perbankan untuk ditukarkan menjadi bahan pangan.

Penukaran ini dapat dilakukan salah satunya adalah melalui e-warong. E-warong merupakan akronim dari Elektronik Warung Gorong Royong yang merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya (Pedoman Umum Program Sembako 2020 dan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai tahun 2017). E-warong menjadi salah satu sarana bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan pemerintah dengan kualitas dan mutu yang lebih baik, sejalan dengan Instruksi Presiden yang menginginkan perbaikan program pemberian beras kepada masyarakat miskin pada tahun 2016. E-warong yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial dapat menjadi agen pembayaran keuangan sekaligus perpanjangan tangan dari perbankan serta penyedia bahan pangan yang telah bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog bagi penerima manfaat bantuan pangan (Yusnita -et al., 2017).

Sejak program e-warong dijalankan pada tahun 2016 untuk penyaluran BPNT, telah banyak studi yang dilakukan untuk meninjau efektivitas implementasi program e-warong sebagai agen penyaluran BPNT. (Afringgo et al., 2021) dan (Sofi, 2021) dalam hasil temuannya menyebutkan bahwa penyalur BPNT melalui e-warong sudah cukup efektif dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, hasil temuan yang ditunjukkan oleh (Nabila et al., 2021), (Rahayu & Zein, 2021) dan (Hanum & Suryawati, 2021) menyatakan bahwa program e-Warong masih belum berjalan efektif.

Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal, seperti: tidak adanya transparansi keuangan antara pengelola e-Warong, ketidaktegasan pengelola dalam menjalankan aturan e-Warong, kurang kesadaran anggota PKH terhadap tanggung jawab e-Warong, dan kurangnya pemahaman anggota PKH dalam menggunakan teknologi khususnya dalam penggunaan mesin gesek. Selain itu, dijelaskan bahwa implementasi program juga tidak sesuai dengan buku pedoman BPNT. Namun penelitian di Kota Padang berkenaan dengan penyaluran BPNT melalui e-Warong menunjukkan bahwa penyaluran BPNT di Kota Padang berpengaruh pada kesuksesan penyaluran bahan pangan kepada KPM sehingga membantu KPM untuk dapat melakukan pengembangan usaha atau saving untuk bangkit dari kategori kemiskinan. Pengaruh tersebut terlihat pada manfaat yang diberikan kepada KPM, manfaat yang dirasakan e-Warong itu sendiri, serta manfaat dalam pengentasan kemiskinan (Putra & Putera, 2022).

Dalam rangka percepatan pencairan bantuan sosial termasuk BPNT, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial membuat kebijakan baru pada tahun 2022 dengan menggandeng PT Pos Indonesia sebagai salah satu instansi penyalur. PT Pos Indonesia dapat berperan dalam menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai kepada penerima manfaat. Mekanisme pencairan bantuan oleh PT Pos Indonesia untuk Keluarga Penerima Manfaat tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera, sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam penyaluran bantuan. Pencairan dana bantuan oleh KPM dapat dilakukan untuk tiga bulan dalam sekali pencairan. Hal ini dilakukan sebagai asil evaluasi penyaluran di sejumlah tempat di mana KPM menerima bantuan dalam bentuk paket, padahal semestinya KPM bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, mengutip Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, KPM tidak harus menerima bantuan dalam bentuk barang. KPM dapat menerima bantuan dalam bentuk uang. Hal ini dilakukan agar dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang yang dibutuhkan tanpa harus dibatasi dengan paket atau barang yang diberikan.

Berbagai bentuk implementasi kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keberhasilan program yang dijalankan, dalam hal ini keberhasilan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sasaran dalam bentuk BPNT. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Gordon dalam Pasolong dalam (Aini, 2016) bahwa dalam konsep implementasi kebijakan, semua aktivitas harus diarahkan pada realisasi program. Sedangkan indikator-indikator kinerja ini mengukur seberapa jauh ukuran dasar dan tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2012) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan studi implementasi kebijakan publik, tujuan dan sasarannya harus diidentifikasi dan diukur, sebab implementasi akan terealisasi jika tujuan kebijakan terlaksana dan berhasil.

Bantuan BPNT merupakan salah satu bentuk dari implementasi kebijakan publik. Anderson dalam (Muchlis Hamdi, 2014) menyebutkan bahwa kebijakan publik

merupakan kebijakan yang ditetapkan pejabat atau lembaga pemerintah. Terdapat lima konsep dan implikasi kebijakan publik, yaitu: (1) kebijakan publik merupakan tindakan yang sesuai tujuan; (2) kebijakan publik yang berisikan rangkaian tindakan yang diambil berdasarkan sepanjang waktu; (3) kebijakan publik adalah tanggapan dari suatu kebutuhan sehingga akan munculnya kebijakan; (4) kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan nyata pemerintah, bukan hanya sekedar keinginan dan rencana yang akan dilaksanakan.

(Wibawa, 1994) mengemukakan bahwa model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut salah satunya mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan seperti; (a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; (b) Derajat perubahan yang diinginkan; (c) Kedudukan pembuat kebijakan; (d) Pelaksana program; dan (e) Sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, hasil penelitian (Samsudin et al., 2014) menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial, yaitu (1) kualitas aparatur, (2) kompetensi administrator, (3) sarana dan prasarana, dan (4) pengawasan. Merujuk dari hal tersebut, penyaluran BPNT baik melalui e-warong dan PT Pos Indonesia, yang merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik, dapat dievaluasi. Mempertimbangkan waktu dan data lapangan yang didapatkan, maka penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan pada indikator keberhasilan menurut (Wibawa, 1994) terutama pada indikator jenis manfaat yang akan dihasilkan dan tercapainya derajat perubahan yang diinginkan dari penyaluran BPNT melalui e-Warong maupun PT. Pos Indonesia.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Menurut data BPS (2021), angka kemiskinan di Sumatera Barat per Desember 2020 adalah sebesar 6,28% atau sebanyak 344,23 ribu orang berstatus miskin. BPS (2020) menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2020 berkurang jika dibandingkan angka kemiskinan pada tahun 2019 yaitu 6,42 %. Oleh sebab itu, Sumatera Barat juga menjadi salah satu daerah yang mengimplementasikan kebijakan BPNT. Sebagai ibukota dari Provinsi Sumatera barat, maka Kota Padang dapat dijadikan representasi dari implementasi penyaluran BPNT baik melalui e-Warong maupun melalui PT Pos Indonesia. Dari tahun 2016, E-Warong di Kota Padang diintegrasikan di 11 kecamatan di Kota Padang dengan total 316 unit e-Warong di Kota Padang telah menjalankan tugas sebagai pusat layanan sembako masyarakat miskin dan rentan yang ada di Kota Padang. Namun, Sejak awal tahun 2022, penyaluran BPNT juga telah dilakukan oleh 20 kantor PT Pos Indonesia di Kota Padang. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penyaluran BPNT melalui e-Warong dan PT Pos Indonesia di Kota Padang sebagai bentuk implementasi kebijakan

publik yang ada di Indonesia dan sebagai bahan referensi dalam evaluasi kebijakan terkait BPNT kedepannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melihat implementasi penyaluran BPNT di e-Warong dan di PT Pos Indonesia di Kota Padang. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif agar dapat mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara terperinci dan jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data secara primer dan sekunder. Pengumpulan data secara primer dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 11 e-Warong yang sebelumnya menyalurkan BPNT di Kota Padang yang dipilih secara sengaja masing-masing satu e-Warong di setiap Kecamatan di Kota Padang dan 11 orang KPM sebagai objek penyaluran bantuan BPNT yang bertempat tinggal disekitar e-Warong pada saat peneliti melakukan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data secara sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan informasi terkait, seperti dari BPS, PT Pos Indonesia, termasuk beragam literatur seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang dapat menunjang data penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis miles and huberman, dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam melihat implementasi penyaluran BPNT di dua saluran/provider ini dapat dilihat berdasarkan Wibawa dalam (Wibawa, 1994) yang mengemukakan bahwa model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan dari 5 (lima) indikator yaitu; (a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;(b) Derajat perubahan yang diinginkan;(c) Kedudukan pembuat kebijakan; (d) Pelaksana program; dan (e) Sumber daya yang dihasilkan.

Namun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan indikator: jenis manfaat yang dihasilkan oleh Peyaluran BPNT di masing-masing provider dan indikator derajat perubahan yang dihasilkan oleh penyaluran BPNT baik melalui e-Warong maupun PT. Pos Indonesia. Sedangkan untuk indikator pembuat kebijakan dan pelaksana program telah jelas dalam kasus ini yaitu pembuat kebijakan adalah Kementerian Sosial republik Indonesia dan pelaksana program adalah instansi pemerintah terkait dan 2 (dua) provider yang ingin peneliti teliti pada penelitian ini yaitu e-Warong dan PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk sumber daya yang dihasilkan akan tergambar pada indikator jenis manfaat dan perubahan yang dihasilkan sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Penyaluran BPNT melalui e-Warong

Penyaluran BPNT secara non tunai melalui e-Warong ini sudah dimulai sejak tahun 2017 yang lalu. E-Warong dimana tempat penyaluran bantuan non tunai ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan pangan secara cepat karena dekat dengan lokasi pemukiman masing-masing disebabkan lokasi dan sebaran e-Warong yang tersebar luas. Di Kota Padang, e-Warong dilengkapi dengan tools EDC (Electronic Data Capture) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah. Pada umumnya yang menjadi e-Warong adalah masyarakat yang memiliki usaha seperti toko/warung yang menjual bahan pangan karbohidrat dan protein alami. Oleh karena itu masyarakat yang bergabung menjadi e-Warong memiliki kepastian dalam penjualan barang dagangannya, selanjutnya kelebihan dari penyaluran BPNT melalui e-Warong yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

Manfaat yang dihasilkan penyaluran melalui e-Warong;

Manfaat dari e-Warong ini sudah tentu untuk mendukung program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dari manfaat positif yang dapat diterima baik dari e-Warongnya sendiri, penerimaan bantuan (penerima manfaat) bahkan pada masyarakat sekitar e-Warong. Namun agar tujuan itu tercapai dan dapat dirasakan, maka pihak e-Warong harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial antara lain; (1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas, di wilayah operasionalnya; (2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan; (3) Menjual harga pangan sesuai harga pasar; (4) Memiliki jaringan informasi dan Kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM. (Berkelanjutan dalam menyediakan bahan pangan); (5) Dapat melayani KPM dan Non KPM; dan (6) Komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan disabilitas.

Berdasarkan analisis manfaat maka dapat disimpulkan manfaat dan perubahan positif yang didapatkan dari penyaluran BPNT melalui e-Warong adalah sebagai berikut;

- Pengembangan Ekonomi Lokal

Hal ini karena e-Warong telah menciptakan suatu sistem integrasi antara elemen-elemen ekonomi lokal yang ada di sekitar e-Warong. Sebagai contoh e-Warong yang menjual beras tentu memiliki pemasok beras dari hulu atau dari petani langsung, begitu juga dengan e-Warong yang menjual ikan tentu memiliki pemasok ikan baik penjual ikan di pasar, maupun langsung ke nelayannya. Hal ini merupakan sebuah bentuk pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk memanfaatkan beberapa sumber daya lokal yang ada dan diharapkan dapat membuat pengembangan perekonomian bisa

meningkat. Pentingnya ekonomi lokal ini disebabkan karena dapat menjadi momentum untuk menghasilkan suatu kesempatan atau lapangan kerja baru serta mendorong pembangunan perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut (Mudrajad, 2014). Selanjutnya, pengembangan Ekonomi Lokal juga bertujuan sebagai penggerak ekonomi daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran serta menggalakan pembangunan yang berkelanjutan di tengah arus globalisasi ekonomi dengan berfokus pada kompetensi yang dimiliki daerah serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada (Adiwidjaja, 2019).

Berdasarkan jumlah e-Warong yang ada dikota Padang, yang tersebar sampai pada level kelurahan dan RW, maka dapat menjadi wadah pengembangan ekonomi lokal setempat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Ketika masyarakat penerima bantuan akan mencairkan bantuan ke e-Warong terdekat, maka dari setiap beras yang didapatkan penerima manfaat, maka ada manfaat yang diperoleh oleh petani atau distributor beras setempat, petani kacang/sayur dan peternak juga merupakan segmen yang mendapat manfaat dari pengembangan ekonomi lokal oleh keberadaan e-Warong tersebut. Oleh karena itu ketika ada satu e-Warong yang beroperasi disatu kelurahan, berarti e-Warong tersebut telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan ekonomi di kelurahan tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Putra & Putera, 2022) yang menunjukkan bahwa Pemberdayaan UMKM dapat dikaitkan dengan implementasi e-Warong dalam penyaluran BPNT. Dengan kapasitas 1 e-Warong dapat melayani 100 KPM yang membutuhkan beras, telur dan protein lainnya, tentu masyarakat pengelola e-Warong mendapatkan tambahan pendapatan dengan peningkatan kuantitas jual bahan sembako tersebut. Kepastian dan keberlangsungan penjualan akan membuat masyarakat pengelola e-Warong dapat meningkatkan kapasitas usahanya, di samping fee transaksi yang diberikan bank atas penggunaan alat/tools laku pandai/edc yang dititipkan kepada pengguna e-Warong. Dengan kata lain, pemberdayaan dan pemerataan ekonomi masyarakat di wilayah e-Warong berada juga dapat terwujud karena juga berimbas kepada distributor dan peternak/petani yang menyalurkan dan memproduksi barang bantuan tersebut.

Hasil temuan peneliti sebelumnya juga dibuktikan dengan hasil kunjungan langsung peneliti pada e-Warong yang ada di Kota Padang, dimana semua e-Warong yang dikunjungi menyatakan bahwa terdapat penurunan pendapatan setelah tidak lagi menyalurkan BPNT, hal ini juga berpengaruh pada jumlah pesanan bahan pangan yang dipesan kepada distributor, petani, dan peternak yang biasanya akan meningkat drastis pada waktu penyaluran BPNT.

- **Mempermudah Akses Penerima Manfaat dan Peningkatan Hubungan Sosial Setempat**

Hal ini terlihat dari ketersebaran e-Warong yang bahkan sampai ke tingkat RW, maka dipastikan masyarakat penerima manfaat juga akan terbantu untuk dapat mendapatkan bantuan pangan secara cepat disekitar wilayah tempat tinggalnya. Hal ini juga akan meningkatkan hubungan personal antara e-Warong dengan masyarakat yang ada disekitarnya karena pihak e-Warong juga mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan pangan tersebut. Bisa jadi sebelumnya beberapa warga sekitar yang termasuk rentan ekonomi belum sempat atau mampu berbelanja ke e-Warong, namun setelah adanya bantuan BPNT, maka terjadi komunikasi yang aktif antara warga dan e-Warong sehingga terbentuk suatu ikatan yang juga dapat mempererat hubungan sosial di daerah tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa 1 (satu) e-Warong dapat melayani sampai dengan 100 KPM yang ada didaerah tempat tinggal e-Warong. Pembagian wilayah pembagian BPNT telah ditentukan oleh Dinas Sosial setempat sehingga e-Warong hanya dapat melayani KPM disekitar tempat tinggalnya. Dengan adanya pencairan BPNT di e-Warong, maka komunikasi antar warga akan terus terjalin dan KPM dapat terbantu karena tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan bantuan BPNT.

- **Sebagai Agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dala rangka Inklusi Keuangan)**

Hal ini dikarenakan semua e-Warong dilengkapi dengan EDC yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang di tunjuk untuk melayani BPNT di Kota Padang. Dengan penggunaan EDC ini, maka e-Warong juga menjadi agen Laku Pandai yang juga bisa melayani kebutuhan perbankan masyarakat sekitar termasuk masyarakat penerima manfaat seperti transfer, pembayaran tagihan, tarik tunai, dan kebutuhan perbankan lainnya. Sebagai agen Laku Pandai, maka e-Warong juga dapat memberikan edukasi agar masyarakat penerima manfaat untuk dapat menyisihkan pendapatan mereka sekecil apapun agar ditabung melalui program tabungan bersubsidi yang dikeluarkan pemerintah serta menggunakan produk perbankan lainnya untuk mempermudah kebutuhan penerima manfaat selain penggunaan kartu BPNT untuk menerima bantuan pangan di e-Warong. Derajat perubahan dapat dilihat disini, ketika sebelum adanya e-Warong masyarakat masih belum terbiasa dengan pelayanan yang bersifat digital sebagai contoh pelayanan perbankan, namun sebagai e-Warong masyarakat telah ahli dalam menjalankan alat EDC yang memerlukan pengethua yang cukup untuk menjalankannya.

- Meningkatkan Kapasitas Pedagang yang menjadi e-Warong

Selain adanya kepastian penjualan bahan pangan sesuai dengan ketentuan pemerintah kepada penerima, manfaat yang tentu akan meningkatkan kapasitas e-Warong, maka e-Warong yang juga sebagai agen Laku Pandai juga mendapatkan fee dari transaksi perbankan yang dilayani di e-Warong. Fee tersebut merupakan pembagian hasil antara Bank Pemerintah yang mengeluarkan EDC dengan e-Warong itu sendiri (50%-50%). Sebagai contoh, ketika biaya transfer yang ditentukan Bank adalah Rp. 1.500,- maka 50% dari biaya tersebut langsung menjadi fee untuk e-Warong. Hal ini tentu juga akan menambah kapasitas e-Warong selain dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan pangan.

- Pemerataan Ekonomi.

Selain dengan pengembangan ekonomi lokal, maka dengan tersebarnya e-Warong di Kota Padang sampai ke Kelurahan dan RW, dapat mengantisipasi monopoli distributor-distributor bahan pangan yang menyediakan bahan pangan dalam jumlah besar. Para e-Warong dapat bebas memilih distributor atau petani terdekat sebagai penyedia bahan pangan yang dibutuhkan. Namun dengan banyaknya manfaat penyaluran melalui e-Warong ini, maka harus diperhatikan beberapa hal yang dapat menjadi perhatian pihak-pihak terkait yaitu harus adanya monitoring yang ketat agar e-Warong menjual bahan pangan sesuai dengan ketentuan, karena dengan semakin banyaknya e-Warong, maka semakin besar kemungkinan kecurangan yang dilakukan baik oleh pihak e-Warong bahkan pihak-pihak terkait lainnya, selain itu optimalisasi kapasitas e-Warong yang menggunakan EDC untuk menambah penghasilan tidak akan terjadi jika e-Warong hanya melayani masyarakat penerima manfaat hanya saat jadwal pencairan BPNT, serta tujuan agen e-Warong sebagai agen Laku Pandai juga tidak akan tercapai. Selain itu adanya kesempatan barang pangan yang disediakan e-Warong yang memiliki kualitas yang di bawah standar menjadi pekerjaan rumah bagi pihak terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan tegas ke semua e-Warong yang telah terdaftar, tentu hal ini akan mengeluarkan banyak sumber daya menimbng jumlah e-Warong yang banyak dan tersebar luas dipelosok daerah di Indonesia.

- BPNT melalui PT Pos Indonesia

PT Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang telah memiliki jam terbang yang tinggi dalam hal pelayanan kepada masyarakat dibidang pengiriman dan logistik khususnya di daerah rural di Indonesia. Bukan hanya melayani pengiriman barang, namun PT Pos Indonesia telah bertransformasi menjadi perusahaan yang juga melayani jasa keuangan dan jasa lainnya. Keputusan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai, merupakan hasil evaluasi dari penyaluran di sejumlah tempat. Di antara informasi yang didapat adalah KPM menerima bantuan

dalam bentuk paket. Yang semestinya KPM bisa bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Di sejumlah lokasi juga diketahui kualitas barangnya di bawah standard (Kemensos.go.id,2022).

Manfaat yang dihasilkan penyaluran melalui PT Pos Indonesia;

Beberapa hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait seperti Kemensos menemukan beberapa kecurangan yang dilakukan oleh sebagian e-Warong yang menyalurkan bantuan BPNT salah satunya adalah bahan pangan yang dijual tidak sesuai dengan standar yang diharapkan oleh Pemerintah. Selain itu adanya pihak terkait yang terlibat untuk memanfaatkan momentum untuk memonopoli pasokan bahan pangan ke e-Warong juga menjadi perhatian Pemerintah, sehingga penyaluran BPNT melalui instansi PT Pos Indonesia merupakan jalan yang dipilih oleh Pemerintah untuk menjamin penyaluran BPNT yang diharapkan lebih baik dengan manfaat sebagai berikut; (1) Mempercepat Proses Penyaluran Secara Tunai, yaitu proses jual beli yang sebelumnya menggunakan konversi kartu menjadi bahan pangan yang dipilih oleh penerima manfaat diganti menjadi uang tunai yang dapat diperoleh penerima manfaat sekaligus 3 bulan.

Dengan pencairan uang tunai, maka penerima manfaat yang sebelumnya harus memilih bahan pangan di e-Warong sudah dipastikan langsung mendapatkan uang tunai yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Percepatan proses ini juga terlihat dari struktur pencairan bantuan dari pusat langsung ke PT Pos Indonesia sehingga dapat dilakukan secara serentak dan terdapat kepastian kapan pencairan tersebut dapat dilakukan secara serentak, sehingga penerima manfaat tidak perlu bolak-balik ke e-Warong untuk menanyakan pencairan BPNT. (2) Tepat Sasaran; yaitu dengan penyaluran BPNT secara tunai dapat meminimalisir penyelewengan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam hal pengadaan bahan pangan dan meminimalisir keuntungan yang diluar ketentuan yang diambil oleh e-Warong yang nakal.

Dengan dicairkannya BPNT secara tunai, maka diharapkan uang tersebut langsung diterima oleh penerima manfaat secara utuh, sehingga tidak mengurangi manfaat yang akan dihasilkan oleh bantuan tersebut. (3) Mempermudah Monitoring Penyaluran; yaitu dengan disalurkannya melalui instansi yang memiliki integritas, maka laporan monitoring pencairan juga diharapkan dapat dengan mudah didapatkan setelah jadwal pencairan dilakukan. Disana juga dapat ditemukan apakah semua masyarakat yang terdaftar telah menerima bantuan secara keseluruhan ataukah terdapat penerima manfaat yang belum mencairkan bantuan, sehingga dengan data tunggal dari instansi ini dapat terus memperbarui data penerima manfaat setiap bulannya dan menjadi bahan monitoring Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan penyaluran BPNT melalui e-Warong, tentu penyaluran BPNT secara tunai di PT Pos Indonesia perlu dikaji lebih jauh lagi dengan memperhatikan hal-hal seperti; (1) ketersediaan kantor Pos di daerah, hal ini jika dibandingkan dengan jumlah e-Warong, maka kantor Pos yang tersebar di satu kota jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah e-Warong. Sebagai contoh di Kota Padang menurut data BPS tahun 2020, maka jumlah kantor Pos di Kota Padang hanya berjumlah 20, atau jika dibandingkan jumlah Kecamatan di Kota Padang yang berjumlah 11 Kecamatan maka setidaknya ada 2 Kantor di satu Kecamatan.

Hal ini tentu bisa mempercepat proses pelayanan pencairan tunai, namun menambah waktu akses atau jarak tempuh penerima manfaat ke kantor Pos terdekat; (2) Kepastian untuk memenuhi kebutuhan pangan penerima manfaat sulit dibuktikan; dengan adanya pencairan uang tunai, apalagi sekaligus 3 bulan, tidak memungkiri kemungkinan uang tersebut kembali digunakan oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan lainnya diluar kebutuhan pangan, dengan kata lain agak beralih dari tujuan awal BPNT diluncurkan yaitu untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat. (3) Pengembangan ekonomi lokal terkendala; hal ini akan terjadi bila pencairan secara tunai yang diberikan kepada penerima manfaat tidak digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli bahan pangan sesuai dengan ketentuan, petani yang biasanya menjadi distributor e-Warong sekarang akan mengalami penurunan omset begitu juga para e-Warong sendiri. Pengembangan kapasitas ekonomi juga dapat berkembang hanya pada beberapa daerah atau beberapa warung/toko tertentu saja dimana jika terus terjadi juga akan berdampak pada penurunan kapasitas ekonomi di daerah e-Warong yang sebelumnya beroperasi.

KESIMPULAN

Penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia telah diimplementasikan salah satunya dengan program BPNT. Diharapkan program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial ini dapat menekan pertumbuhan masyarakat rentan dan masyarakat miskin sekaligus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pangan dapat terpenuhi dengan baik. Sejalan dengan pendapat Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan tersebut salah satunya adalah mencakup manfaat dari kebijakan tersebut dan apa yang dirasakan oleh penerima/objek kebijakan tersebut, maka manfaat dari penyaluran di dua saluran/provider ini sangat perlu dipertimbangkan untuk penentuan kebijakan BPNT selanjutnya.

Dalam implementasi BPNT yang disalurkan melalui e-Warong beberapa manfaat dan perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan antara lain terdapatnya pengembangan ekonomi lokal, mempermudah akses penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan pemahaman masyarakat berkenaan dengan inklusi keuangan,

meningkatkan pendapatan e-Warong serta menciptakan pemerataan ekonomi. Namun yang perlu diperhatikan dalam penyaluran melalui e-Warong ini adalah bagaimana setiap e-Warong dapat menjual bahan pangan sesuai dengan standar dan ketentuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial, disamping itu evaluasi dan monitoring perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas penyaluran dan meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi oleh pihak tertentu.

Selanjutnya penyaluran BPNT melalui PT Pos Indonesia diharapkan dapat mempercepat penyaluran secara tepat sasaran dan lebih cepat dengan metode tunai. Namun perlu diperhatikan lagi kemudahan akses penerima manfaat ke Kantor Pos terdekat menimbang jumlah kantor serta perlunya memperhatikan pengembangan ekonomi lokal setempat agar juga mendukung peningkatan ekonomi daerah. Selain itu perlu ditentukan metode untuk memastikan bahwa penyaluran BPNT secara tunai benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan pangan dan masyarakat tidak merasa terbebani dengan jarak tempat tinggal KPM dengan lokasi Kantor Pos.

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali oleh Pemerintah untuk menetapkan saluran atau provider dalam penyaluran BPNT agar dapat tersalurkan secara cepat, tepat namun juga dapat memastikan bahwa bantuan tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan lainnya diluar kebutuhan dasar penerima manfaat, selain itu pengembangan ekonomi lokal juga harus menjadi suatu target dalam penyaluran bantuan ini agar dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga membantu menekan jumlah masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Sebagai usulan dari temuan dilapangan, maka Pemerintah dapat menjalankan penyaluran di 2 (dua) provider yaitu e-Warong dan PT. Pos Indonesia dengan menggunakan pembagian waktu penyaluran. Penyaluran di e-Warong dapat dilakukan pada bulan-bulan tertentu dengan memperhatikan musim panen petani agar hasil panen petani dapat dimanfaatkan langsung untuk bantuan BPNT sehingga pertumbuhan ekonomi lokal tetap terjaga. Sedangkan untuk penyaluran melalui PT. Pos Indonesia dapat dilakukan di awal atau akhir tahun mengikuti kepentingan dan target-target tertentu yang ingin dicapai oleh Pemerintah.

REFERENSI

- Adiwidjaja, I. (2019). *Kebijakan Pembangunan Ekonomi: Kajian Sektor Publik, Lokal, Nasional, dan regional*. Zahir Publishing.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22–29. <https://doi.org/10.47134/rapik.v1i1.5>

- Aini, N. (2016). Pengembangan Dosen Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Kabupaten Jayawijaya. *Agustus-Desember*, 3(2), 93–100.
- [BPS]. Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>.
- [BPS]. Badan Pusat Statistik. (2021). Jumlah kantor pos di kota padang. Retrieved from <https://padangkota.bps.go.id/indicator/162/323/1/jumlah-kantor-pos.html>
- Djaenal, R., J. E. Kaawoan, & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Hanum, A. F., & Suryawati, R. (2021). Evaluasi Implementasi Program E-Warong KUBE-PKH di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Kecamatan Mojolaban). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 2021–2203.
- Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin, H. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo). *Inovasi Penelitian*, 2(5), 1647–1654.
- Hjelm, L., Mathiassen, A., & Wadhwa, A. (2016). Measuring Poverty for Food Security Analysis: Consumption-Versus Asset-Based Approaches. *Food and Nutrition Bulletin*, 37(3), 275–289. <https://doi.org/10.1177/0379572116653509>
- Kemensos. (2022). Gandeng PT POS Indonesia Kemensos Percepat Salur BPNT Secara Tunai. Retrieved from <https://kemensos.go.id/gandeng-pt-pos-indonesia-kemensos-percepat-salur-bpnt-secara-tunai>
- Muchlis Hamdi. (2014). *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Mudrajad, K. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(2), 303–309. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i2.21327>
- Putra, R. E., & Putera, R. E. (2022). Evaluasi e-Warong sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1). <https://doi.org/10.35308/xxxxx>
- Rahayu, R., & Zein, A. S. (2021). Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 271–279. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3587>
- Sakyi, P. (2012). Determinants of food accessibility of rural households in the Limpopo province, South Africa. *Agrekon*, 9(1), 76–99.

-
- Samsudin, M., Kusuma, A. R., & Djaya, S. (2014). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 2(1), 74–87. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/501>
- Selviana. (2016). Bantuan Langsung Tunai Selviana. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV(1), 1–10.
- Setyawan, anton agus. (2001). *Kemiskinan di Dunia Ketiga dalam Perspektif Ekonomi Politik Internasional* (Vol. 2, pp. 119–133).
- Soetrino, L. (1997). *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik*. Kanisius.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis* (1st ed.). Intermedia.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS.